





Laporan Keanggotaan Sea Delight, LLC dalam Seafood Savers





Ringkasan perkembangan perbaikan
Ikan Karang, Pancing Ulur/Rawai Dasar
Banggai, Sulawesi Tengah
Juli 2012- Desember 2012





Muhammad Maskur Tamanyira – Seafood Savers
Officer





1. **Lokasi** : Banggai, meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, Sulawesi Tengah
 Survey pertama : Oktober 2010
 Jumlah petambak/nelayan : Total keseluruhan nelayan adalah 208, dengan jumlah pengepul 5 orang yang tersebar di seluruh area Banggai (2013)
2. **Praktik Penangkapan**
- Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : 4 – 6 Ons
 - Metode penangkapan : Pancing Ulur dan atau Rawai Dasar, dengan armada tangkap 1-3 GT
 - Kisaran harga beli di nelayan : Rp. 10.000 – 16.000/ Kg (2013)

Jenis Ikan target adalah sebagai berikut :

Nama Asing	Nama Ilmiah	Panduan Gambar KKP	Fishery Improvement Project Code (FIPC)
Malabar Snapper	<i>Lutjanus malabaricus</i>		A
Crimson Snapper	<i>Lutjanus altifrontalis</i>		B

<p>John Snapper</p>	<p><i>Lutjanus johni</i></p>		<p>C</p>
<p>Lehi Snapper</p>	<p><i>Aphareus rutilans</i></p>		<p>D</p>
<p>Uku Snapper</p>	<p><i>Aprion virescens</i></p>		<p>E</p>
<p>Opakpaka</p>	<p><i>Pristipomoides filamentosus</i></p>		<p>F</p>

Onaga	<i>Etelis coruscans</i>		G
Hachijo	<i>Etelis carbunculus</i>		H
Orange-spotted Grouper	<i>Epinephelus coioides</i>		I
Six Bar Grouper	<i>Epinephelus sexfaciatus</i>		J

<p>Greasy Grouper</p>	<p><i>Epinephelus tauvina</i></p>		<p>K</p>
<p>Long Nosed Emperor</p>	<p><i>Lethrinus olivaceus</i></p>		<p>L</p>
<p>Spangled Emperor</p>	<p><i>Lethrinus nebulosus</i></p>		<p>M</p>
<p>Purple Headed Emperor</p>	<p><i>Lethrinus lentjan</i></p>		<p>N</p>

3. Kapasitas produksi

Pada tahun 2012, sebanyak 34,514 Kg ikan olahan dalam bentuk fillet dikirim dari CV. Indotropic ke Sea Delight, LLC

4. Keterangan tambahan

-

Rincian evaluasi keanggotaan (nama perusahaan) berdasarkan *Fisheries Improvement Program (FIP)* yang telah dilaksanakan:

AKSI/TUGAS	OUTPUT	AKSI DETAIL (Bagi anggota Seafood Savers)	ACTION LEAD & PARTNERS	Tahapan SEAFOOD SAVERS		AKSI/TUGAS	RENCANA TINDAK LANJUT/ KENDALA
				INTERMEDIATE	ADVANCE		
1. TATA KELOLA DAN DEFINISI DARI OBJEKTIF PENGELOLAAN PERIKANAN NASIONAL							
1.1. Memperjelas objektif untuk memastikan bahwa prioritas diberikan pada perikanan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan berbasis lestari pada tingkat kabupaten dan provinsi	Mekanisme untuk memperluas hukum pada saat ini untuk memprioritaskan keberlanjutan dari perikanan, ketimbang objektif produksi dan perumbuhan, dan mengakomodasi prinsip PAFM dan EAFM	Memfasilitasi proses perkembangan dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSDI, Instansi Perikanan		6 bln	Belum dilaksanakan	Pelaksanaan Penilaian EAFM belum dilaksanakan
		1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung			6 bln		

		prinsip perikanan berkelanjutan				
1.2. Perpanjangan dari system pengelolaan pada tingkat lokal	Mengoptimisasi adaptasi regulasi dan implementasi pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten (regulasi lokal, kepercayaan lokal, dll), tinjauan dari ahli hukum untuk menilai mekanisme terbaik untuk implementasi regulasi pada hukum di tingkat provinsi/kabupaten sampai nasional (Hukum 31/2004 dan 32/2004).	1.2.1 Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai intepertasi dari peraturan kementerian terkait rencana pengelolaan yang mencakup Harvest Control Rule	SDI, P4KSDI, Dinas, PLN, KKJI, PSDKP		60 bln	Belum dilaksanakan Belum adanya skema pelaksanaan regulasi yang selaras dengan nasional di wilayah Banggai dan sekitarnya
		1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur pada rencana pengelolaan perikanan Provinsi/kabupaten sebagai patron dari perkembangan dan implementasi di area tersebut. Rencana tersebut harus memiliki harvest control rule yang			12 bln	Belum dilaksanakan Belum adanya skema pelaksanaan regulasi yang selaras dengan nasional di wilayah Banggai dan sekitarnya

		mencakup prinsip perikanan berkelanjutan contoh: ukuran tangkap minimum, menyesuaikan jumlah usaha dengan kapasitas stok				
		1.2.3. Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai perpanjangan dari regulasi EAFM dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan			Belum dilaksanakan	Belum adanya skema pelaksanaan regulasi yang selaras dengan nasional di wilayah Banggai dan sekitarnya
		1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur di guideline EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang			Belum dilaksanakan	Belum adanya skema pelaksanaan regulasi yang selaras dengan nasional di wilayah Banggai dan sekitarnya

		berkelanjutan sebagai patron dari pengembangan dan implementasi dari EAFM di tingkat Provinsi/Kabupaten				
1.3. Pengembangan rencana pengelolaan perikanan spesifik (Rencana Pengelolaan Perikanan)	Mengadopsi dan memasukan parameter keberlanjutan (contoh: Risk Based assessment, EAFM, pendekatan pencegahan) pada rencana manajemen perikanan	1.3.1 Pengembangan dan pengadopsian prinsip rencana pengelolaan ikan karang pada area tersebut	SDI, Instansi Perikanan, Universitas Hasanudin di Makassar		12 bln	Belum dilaksanakan Upaya penyusunan RPP untuk ikan karang belum diinisiasi di tingkat Kabupaten dana tau Nasional
		1.3.2 Perusahaan secara proaktif mendukung dan mengimplementasikan rencana pengelolaan (contoh: Menyediakan surat mengenai rencana pengelolaan, secara aktif menghadiri pertemuan apabila diwajibkan)			6 bln	Belum dilaksanakan Upaya penyusunan RPP untuk ikan karang belum diinisiasi di tingkat Kabupaten dana tau Nasional

1.4. Pengembangan <i>Territorial User Rights for Fisheries</i>	Lokakarya tentang pengenalan TURF sebagai salah satu alat penting dalam pengelolaan perikanan dan pengimplementasian TURF yang diperkuat oleh kerangka legal	1.4.1 Menginisiasi lokakarya TURF (atau langkah RBM lain) yang juga mengidentifikasi langkah yang dibutuhkan untuk mengembangkan mekanisme	SDI, Fishery agency, Community fishers, NGOs (TNC/WWF), Hasanudin University in Makassar	6 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kriteria baku untuk TURF (masih dikembangkan)
		1.4.2 Mengimplementasikan TURF (atau langkah RBM lain) untuk mengelola perikanan		24 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kriteria baku untuk TURF (masih dikembangkan)
		1.4.3 Perusahaan memfasilitasi implementasi mekanisme TURF (atau langkah RBM lain)					
1.5. Menggambaran zona no take	Mengoptimalkan pengelolaan MPA berbasis prinsip ilmiah (termasuk minimal 10-30% no take zone dari total area karang)	1.5.1 Mengumpulkan dan mengevaluasi semua informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan marine no take zone system baru atau yang sudah ada	KKJI, Instansi Perikanan, Kelompok nelayan, Organisasi Lingkungan (TNC/WWF),	6 bln		Belum dilaksanakan	MPA sudah terbangun diantaranya (Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Banggai Kepulauan). Namun belum ada zonasi untuk no take zone, terutama di wilayah tangkap nelayan yang menjual untuk CV Indotropic Fishery

		1.5.2 Menentukan no take zone dan peraturan terkait untuk mendukung perikanan		6 bln		Belum dilaksanakan	MPA sudah terbangun diantaranya (Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Banggai Kepulauan). Namun belum ada zonasi untuk no take zone, terutama di wilayah tangkap nelayan yang menjual untuk CV Indotropic Fishery
		1.5.3 Mengimplementasikan hasil penggambaran dona tersebut		18 bln		Belum dilaksanakan	MPA sudah terbangun diantaranya (Kawasan Konservasi Perairan Banggai dan Banggai Kepulauan). Namun belum ada zonasi untuk no take zone, terutama di wilayah tangkap nelayan yang menjual untuk CV Indotropic Fishery
2. MEMPERKUAT KERANGKA INSTITUSIONAL							
2.1. Memperbaiki struktur dari system pengelolaan perikanan	Mengembangkan objektif nasional, Sub FKPPS memfasilitasi adopsi dari HCRs,	2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan dari peraturan (cth: peraturan kementerian) yang mendukung FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (cth: satuan tugas) agar bertanggungjawab atas pengelolaan	SDI, Instansi KKP di Provinsi dan Kabupaten, Organisasi Lingkungan (WWF/TNC), Pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan		18 bln	Belum dilaksanakan	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS

	perikanan ikan karang				
	2.1.2 Secara aktif melibatkan industry, instansi penelitian, dan LSM di pertemuan terkait pengambilan keputusan perikanan			18 bln	Belum dilaksanakan Bekum adanya panduan penyusunan HCR yang jelas di tingkat nasional dan atau lokal
	2.1.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat pada proses pengambilan keputusan di tingkat provinsi/kabupaten dan nasional (cth: menghadiri pertemuan)			60 bln	Belum dilaksanakan FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS
	2.1.4 Memonitor dan evaluasi kinerja dari otoritas pengelolaan				FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat

		Provinsi/Kabupaten yang dilakukan oleh agen internal dan eksternal dari KKP dari Provinsi/Kabupaten yang bertanggungjawab untuk pengelolaan perikanan ikan karang					dari setiap hasil pertemuan FKPPS
2.2. Mengidentifikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kapasitas keseluruhan badan pelaksana	Tugas yang didefinisikan untuk semua pemangku kepentingan, Satker Perikanan Ikan Karang, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta Komunitas	2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan peraturan (peraturan kementerian, peraturan direktorat jendral, dll) mengenai alokasi deskripsi pekerjaan kepada agen yang tepat untuk mendukung pengelolaan perikanan	SDI, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten, komunitas, pemangku kepentingan, Organisasi Lingkungan		24 bln	Belum dilaksanakan	Belum ada ketentuan yang jelas terkait regulasi dalam monitoring dan evaluasi terkait performa pengelola perikanan Propinsi/ Kabupatm
3. AKTIVITAS PENELITIAN							
3.1. Memperkuat kapasitas manusia dan	Mengembangkan system kerjasama di industry, instansi penelitian,	3.1.1 Workshop mengenai <i>stock assessment</i> ; meliputi	P4KSI, BPPL dan Universitas Hasanudin Makassar	6 bln		Sea Delight bersepakat untuk melakukan pengumpulan data	Tidak tersedianya pernyataan resmi melalui surat atau surat keputusan

institusional untuk stock assessment di Indonesia	universitas, NGO dan instansi perikanan untuk melaksanakan stock assessment untuk perikanan kakap dan kerapu	methodology dan analisis pengumpulan data, dan rencana sinkronisasi				dan akan meminta CV. Indotropic untuk bersedia membantu aktivitas	
		3.1.2 Pelatihan mengenai <i>stock assessment</i> , biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan		3 bln		Belum dilaksanakan	Belum tersedianya panduan melakukan stock assessment
		3.1.3 Mengembangkan kebijakan perusahaan terkait komitmen untuk mendukung pengumpulan data untuk <i>stock assessment</i> dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi (logbook, wawancara, sample gonad, dll)		3 bln		Belum dilaksanakan	Belum tersedianya panduan melakukan stock assessment
3.2. Tinjauan ilmiah	Informasi mengenai indicator dari status stok ikan karang tersedia (informasi biologis ikan, dll)	3.2.1 Melakukan tinjauan ilmiah pada indicator stok ikan karang	P4KSI, BPPL dan Universitas Lokal	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum mengidentifikasi rekanan universitas dana tau peneliti untuk review ilmiah stok di Banggai

3.3. Risk assessment	Melaksanakan TOT pada BRPL untuk Risk Assessment, untuk stock assessment kakap dan kerapu melibatkan manajer dan peneliti perikanan	3.3.1 Workshop pelatihan mengenai <i>risk assessment</i> , termasuk simulasi	P4KSI, BPPL, DKP, dan Universitas Hasanudin Makasar, Organisasi Lingkungan, Komunitas, Pengepul, Proessor	3 bln		Belum dilaksanakan	Kegiatan masih sebatas pematangan konsep internal di WWF Indonesia untuk didorongkan kepada pihak-pihak terkait
		3.3.2 Melaksanakan <i>Risk Based Assessment</i>		3 bln		Belum dilaksanakan	Kegiatan masih sebatas pematangan konsep internal di WWF Indonesia untuk didorongkan kepada pihak-pihak terkait
3.4. Kelimpahan stok dan <i>stock assessment</i>	Melaksanakan studi mengenai limit reference points berdasarkan ukuran ikan, yang melibatkan industry untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan	3.4.1 Studi mengenai LRP untuk Kerapu dan Kakap	P4KSI/BPPL, Universitas di Makassar	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum tersedianya kajian mengenai LRP untuk jenis grouper dan snapper
		3.4.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g.		3 bln		Sea Delight melanjutkan pencatatan ikan dengan konsversi nota beli produk dari pengepul	Terus melakukan pencatatan nota pembelian

		Logbook, interview, gonad sampling, dll)					
3.5. Komposisi armada	Mengembangkan strategi/regulasi untuk mengimplementasi ka reduksi usaha penangkapan	3.5.1 P4KSI dan universitas lokal akan melaksanakan studi mengenai usaha terbaik yang diperbolehkan pada perikanan dan solusi untuk mengurangi usaha	DKP Provinsi dan Kabupaten	6 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kaidah/ panduan yang diterbitkan untuk bisa digunakan sebagai acuan
		3.5.2 Pemerintah lokal akan mengembangkan peraturan dan memfasilitasi implementasi untuk mengurangi usaha		6 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada kaidah/ panduan yang diterbitkan untuk bisa digunakan sebagai acuan
		3.5.3 Perusahaan berpartisipasi dalam implementasi peraturan pada rantai suplai				Belum dilaksanakan	Belum ada kaidah/ panduan yang diterbitkan untuk bisa digunakan sebagai acuan

3.6. Produktifitas stok	Melaksanakan studi mengenai produktifitas stok	3.6.1 Workshop ke pemangku kepentingan lain mengenai pengumpulan data	P4KSI, BPPL, SDI, Universitas, Industri (langsung dari haji dan perusahaan pembeli)	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada dasar pengumpulan data untuk produktifitas stok
		3.6.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan memberikan akses ke fasilitas produksi perusahaan (e.g. Logbook, interview, gonad sampling, dll)					
		3.7. Pengumpulan data bycatch		3 bln		Belum dilaksanakan	Belum ada dasar pengumpulan data untuk produktifitas stok
3.7. Pengumpulan data bycatch	Mengembangkan program observer untuk spesies non-target (retained species, ETP, dan habitat) dari rawai	3.7.1 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data bycatch (Data	SDI, KKJI, P4KSI, Universitas, PLN, KAPI, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten	6 bln		Belum dilaksanakan	Pengumpulan data ETP dan observer belum digagas karena di tingkat nasional belum adanya dasar peraturan mendorong kegiatan ini di lapangan

	dasar dan pancing ulur	yang sudah ada perlu lebih rinci)					
		3.7.2 Pelatihan observers/enumerator		3 bln		Belum dilaksanakan	Pengumpulan data ETP dan observer belum digagas karena di tingkat nasional belum adanya dasar peraturan mendorong kegiatan ini di lapangan
		3.7.3 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk <i>stock assessment</i> dengan memfasilitasi aktivitas penelitian dan memberikan akses kepada observer/enumerator untuk bekerja di kapal penangkap dan pengumpul ikan, yang juga melibatkan universitas lokal dan komunitas		6 bln		Belum dilaksanakan	Pengumpulan data ETP dan observer belum digagas karena di tingkat nasional belum adanya dasar peraturan mendorong kegiatan ini di lapangan
3.8. Pemetaan bawah air	System monitoring habitat telah	3.8.1 Metodologi untuk system	KKJI, NGO, Universitas,	3 bln		Belum dilaksanakan	Belum diidentifikasinya metode yang akan digunakan

	dikembangkan dan dilaksanakan setiap tahun	monitoring habitat telah diidentifikasi dan pelatihan dilaksanakan	Agen KKP Provinsi dan Kabupaten, Pembeli/Prosesor				untuk melakukan penilaian ini
		3.8.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk monitoring habitat		60 bln		Belum dilaksanakan	Belum diidentifikasinya metode yang akan digunakan untuk melakukan penilaian ini
3.9. Modelling ekosistem	Kompilasi studi mengenai dampak dari perikanan pancing ulur dan rawai dasar pada ekosistem	3.9.1 Universitas lokal melaksanakan studi terkait	BPPL, Universitas Hasanudin di Makassar	6 bln		Belum dilaksanakan	Metode dan konsep belum ditetapkan
3.10. Peer review dari keefektifan program penelitian		3.10.1 Melaksanakan tinjauan assessment	Independent reviewer	3 bln		Belum dilaksanakan	Metode dan konsep belum ditetapkan
4. PENGUATAN KEPATUHAN							
4.1. Mendefinisikan peran dari POKMASWAS dan menentukan aksi	Memperkuat POKMASWAS (kelompok pengawas komunitas	4.1.1 Memfasilitasi pembentukan dari PokMasWas, mempersiapkan pengawasan dan rencana monitoring praktik penangkapan ikan	PSDP, Agen KKP Provinsi dan Kabupaten / POKMASWAS		3 bln	Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS

		(termasuk institusional dan capacity building)				
		4.1.2 Monitor kinerja dari PokMasWas sebagai bagian dari system pengelolaan			3 bln	Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.2. Memperkuat legislasi pada sanksi			3 bln	Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
4.2. Memperkuat legislasi pada sanksi	pelanggaran yang sudah ada untuk diperhitungkan dalam proses langkah pengelolaan pada perikanan (EEZ, archipelagic dan coastal)	4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	PSDP/Departemen Legal KKP		3 bln	Belum dilaksanakan Kegiatan ini bersifat di nasional. Perusahaan harus aktif dan berpartisipasi jika ada pertemuan terkait isu ini di Kabupaten ataupun Provinsi
		4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sangsi untuk pemangku kepentingan dari			6 bln	Belum dilaksanakan Kegiatan ini bersifat di nasional. Perusahaan harus aktif dan berpartisipasi jika ada pertemuan terkait isu ini

		perikanan ikan karang				di Kabupaten ataupun Provinsi
		4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi			60 bln	Belum dilaksanakan Kegiatan ini bersifat di nasional. Perusahaan harus aktif dan berpartisipasi jika ada pertemuan terkait isu ini di Kabupaten ataupun Provinsi
4.3. Penjangkauan melalui edukasi	Diperluas ke jaringan POKMASWAS. Membutuhkan pembelian yang cukup dari pengepul dan pengolah.	4.3.1 Memfasilitasi pelatihan mengenai pengawasan kepada PokMasWas dan PSDP di tingkat Provinsi dan Kabupaten	DKP District, BPPL, WWF dan prosesor	6 bln		Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.3.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan pemangku kepentingan terkait pengawasan lain untuk memperbaiki penegakan dan pengawasan		3 bln		Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.3.4 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang		3 bln		Belum dilaksanakan Belum teridentifikasi kelompok yang akan

		mendukung penegakan petugas yang bekerja di lapangan					dijadikan pionir untuk POKMASWAS
4.4. Laporan dipersiapkan dan dapat di akses publik, mengidentifikasi pelanggaran yang terdeteksi	Laporan telah dipersiapkan dan mengidentifikasi hasil aktifitas inspeksi, terutama terkait aktifitas penangkapan ikan	4.4.1 Memfasilitas pengumpulan dari laporan mengenai kepatuhan terhadap peraturan	PSDP, Agen KKP di Provinsi dan Kabupaten	60 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.2 Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs KKP		60 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan terkait pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan mengenai pelanggaran peraturan		60 bln		Belum dilaksanakan	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
5. ISU LAIN							
5.1. Tinjauan dampak dari subsidi bahan bakar pada keberlanjutan kapal 5-30GT; dan < 5 GT.	Melaksanakan tinjauan mengenai dampak dari subsidi dari sumberdaya perikanan pada seluruh perikanan (ramah lingkungan	Telah terlibat di dalam studi mengenai kesempatan dan tantangan dari subsidi perikanan di Indonesia untuk	PDN, PLN, BBRSE		24 bln	Belum dilaksanakan	Penyusunan guideline fisheries subsidies sedang dbangun oleh internal WWF-ID

	dan non-ramah lingkungan) dan variasi GT yang berbeda	mendukung perikanan berkelanjutan				
		Terlibat dalam studi subsidi perikanan			24 bln	Belum dilaksanakan